



Model Analisis Kebijakan Heuristik, Evaluatif, dan Kritis dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Nirmala Hidayati*, Hermiati, Muhlisin, Muchamad Fauyan

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*hidayati.nirmala09@gmail.com

Abstract

Educational policy analysis in PAI is crucial in the era of globalization to ensure the substance of policies in addressing problems and minimizing the negative impacts of their implementation, while simultaneously ensuring the benefit of stakeholders. This study aims to systematically examine the substance of Islamic education policies by combining Heuristic, Evaluative, and Critical policy analysis frameworks, thereby obtaining recommendations for improving PAI policies that are fairer, more inclusive, and contextual. This study uses a library research method that emphasizes the collection and analysis of data in the form of relevant literature and documents. The results of the analysis indicate that PAI curriculum policies require a comprehensive analytical approach to address educational challenges in the global and digital era. The heuristic model plays a role in uncovering policy issues stemming from the social realities of students and formulating adaptive and contextual policy alternatives. The evaluative model shows that the implementation of PAI policies has a positive impact on improving the quality of learning and strengthening religious values, although their effectiveness is still influenced by the readiness of resources and institutional support. Meanwhile, the critical analysis confirms that PAI policies are inseparable from power relations and the potential for ideological bias. This confirms that the combined model of policy analysis provides a holistic understanding, where Islamic Religious Education policies need to be continued with adjustments to strengthen teacher training and digital infrastructure, and must be reformed to be more include, equitable, and socially transformative by eliminating existing biases, so as to be able to produce a generation of Muslims who are religious, digitally proficient, critical, and highly socially conscious.

Keywords: PAI Policy Analysis, PAI Curriculum Development

Abstrak

Analisis kebijakan pendidikan dalam PAI menjadi krusial di era globalisasi untuk memastikan substansi kebijakan dalam menjawab masalah dan meminimalkan dampak negatif implementasinya, sekaligus menjamin kemaslahatan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji substansi kebijakan pendidikan Islam secara sistematis dengan memadukan kerangka analisis kebijakan Heuristik, Evaluatif, dan Kritis, sehingga didapatkan rekomendasi perbaikan kebijakan PAI yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data berupa literatur dan dokumen yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum PAI memerlukan pendekatan analisis yang komprehensif untuk menjawab tantangan pendidikan di era global dan digital. Model heuristik berperan dalam mengungkap persoalan kebijakan yang bersumber dari realitas sosial peserta didik serta merumuskan alternatif kebijakan yang adaptif dan kontekstual. Model evaluatif memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan PAI memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan penguatan nilai keagamaan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan

sumber daya dan dukungan institusional. Sementara itu, analisis kritis menegaskan bahwa kebijakan PAI tidak lepas dari relasi kekuasaan dan potensi bias ideologis. Hal tersebut menegaskan bahwa model gabungan analisis kebijakan memberikan pemahaman holistik, di mana kebijakan PAI perlu dilanjutkan dengan penyesuaian untuk mampu memperkuat pelatihan guru dan infrastruktur digital, serta harus direformasi agar lebih inklusif, adil, dan transformatif sosial dengan menghilangkan bias yang ada, sehingga mampu melahirkan generasi Muslim yang religius, cakap digital, kritis, dan berkesadaran sosial tinggi.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan PAI; Pengembangan Kurikulum PAI

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis yang menentukan arah, tujuan, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan sering kali bersifat *top down*, tidak partisipatif, dan kurang mempertimbangkan konteks sosial serta kebutuhan peserta didik (Nurhadi, 2022). Akibatnya, terjadi kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan implementasi kurikulum PAI di sekolah, terutama dalam hal relevansi, efektivitas, dan internalisasi nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebijakan pendidikan di Indonesia masih cenderung normatif dan minim refleksi kritis terhadap realitas sosial keagamaan peserta didik (Tilar & Nugroho, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan model analisis kebijakan yang mampu membaca secara komprehensif dinamika kebijakan, mengungkap makna di balik kebijakan, serta menilai dampak substantifnya terhadap praktik pendidikan Islam. Kurikulum PAI yang berlaku cenderung bersifat kognitif dan normatif, sementara peserta didik dihadapkan pada tantangan seperti etika bermedia sosial, pluralitas budaya, dan krisis moral yang belum direspon secara memadai oleh kebijakan yang ada (Fasya & Susilowati, 2022).

Selain itu, proses perumusan kebijakan sering kali tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara proporsional, sehingga tidak sedikit kebijakan yang gagal menjawab persoalan di lapangan secara efektif. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi titik lemah dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan PAI. Urgensi pengkajian ini semakin kuat mengingat kebijakan PAI menyangkut pembentukan karakter, nilai, dan orientasi keagamaan generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang masif, PAI memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran keagamaan yang moderat, inklusif, dan relevan dengan kehidupan kontemporer (Siregar, Siregar & Gusmaneli, 2024).

Jika kebijakan PAI gagal menjawab kebutuhan zaman, maka pendidikan agama berisiko kehilangan relevansi sosialnya. Pentingnya menghadirkan pendekatan baru dalam menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan transformatif (Asmawi, 2018). Dalam konteks perubahan paradigma pendidikan yang menuntut integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kompetensi abad ke-21, model analisis kebijakan heuristik, evaluatif, dan kritis menjadi sangat relevan.

Pendekatan heuristik memungkinkan eksplorasi gagasan-gagasan baru dalam pengembangan kebijakan kurikulum. Disamping itu dengan pendekatan evaluatif dapat menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan pendidikan Islam. Sementara pendekatan kritis berfungsi untuk membongkar struktur kekuasaan, bias ideologis, dan ketimpangan sosial yang sering tersembunyi di balik kebijakan pendidikan (Rizkwanti & Caspari, 2024). Dengan demikian, penerapan ketiga model analisis ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan kurikulum PAI yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan.

Meskipun kajian kebijakan PAI telah berkembang dengan menggunakan beragam pendekatan analisis, sebagian besar penelitian masih cenderung bersifat parsial dan terfragmentasi, dengan menitikberatkan hanya pada satu model analisis, baik deskriptif-normatif, evaluatif, maupun kritis secara terpisah. Hingga saat ini, masih relatif terbatas kajian yang secara simultan mengintegrasikan model heuristik, evaluatif, dan kritis dalam satu kerangka analisis kebijakan PAI yang utuh dan berkelanjutan (Jannah et al., 2024). Akibatnya, analisis kebijakan sering kali belum mampu menangkap dinamika kebijakan secara komprehensif, mulai dari proses perumusan berbasis realitas sosial, penilaian efektivitas implementasi, hingga pembacaan relasi kekuasaan dan bias ideologis yang memengaruhi arah kebijakan. Penelitian ini membahas penerapan model analisis kebijakan heuristik, evaluatif, dan kritis dalam konteks pengembangan kurikulum PAI.

Penulis melakukan telaah konseptual terhadap teori-teori kebijakan pendidikan modern dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip filosofis Islam yang berorientasi pada pembentukan insan kamil (Hasanah & Ma'ruf, 2021). Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan dengan nilai-nilai epistemologis pendidikan Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan berpikir. Artikel ini berupaya menunjukkan bahwa penerapan tiga model analisis kebijakan tersebut dapat memperkuat landasan filosofis dan praktis pengembangan kurikulum PAI yang berorientasi pada mutu, relevansi, serta nilai-nilai transformatif pendidikan Islam.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data sekunder berupa literatur dan dokumen relevan terkait pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis model analisis kebijakan heuristik, evaluatif, dan kritis. Pemilihan literatur dilakukan melalui *purposive sampling* dengan menimbang relevansi teoretis, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pengembangan kerangka analisis kebijakan. Kriteria seleksi literatur dalam penelitian ini dirumuskan secara sistematis untuk menjamin relevansi, validitas, dan kemutakhiran sumber data. Pertama, literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi dalam rentang sepuluh tahun terakhir guna memastikan bahwa kajian yang digunakan merefleksikan perkembangan mutakhir dalam bidang analisis kebijakan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Kedua, jenis sumber yang dijadikan rujukan meliputi buku akademik bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan resmi. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan tidak hanya memiliki kredibilitas ilmiah yang tinggi, tetapi juga relevan secara substantif dan kontekstual dalam menganalisis kebijakan pengembangan kurikulum PAI. Prosedur analisis konten dilakukan secara sistematis dengan menggunakan lembar kajian pustaka sebagai instrumen untuk mengorganisasi informasi penting dari setiap sumber. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan langkah membaca, mencatat, dan mengelompokkan isi literatur ke dalam tema-tema yang relevan. Selanjutnya, analisis konten kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tema utama, pola pemikiran, dan keterkaitan antar-sumber yang berkaitan dengan model analisis kebijakan heuristik, evaluatif, dan kritis. Strategi sintesis data dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai penerapan ketiga model analisis kebijakan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Hasil dan Pembahasan

Analisis kebijakan pendidikan tidak lagi dipahami sebatas pemaparan normatif, melainkan sebagai proses konseptual yang reflektif untuk membaca relasi antara tujuan,

desain, dan dampak kebijakan pendidikan. Sebagai ilmu sosial terapan yang sistematis, analisis kebijakan berfungsi mengurai substansi kebijakan guna mengidentifikasi secara jelas problem pendidikan yang hendak diatasi sekaligus potensi persoalan baru yang mungkin muncul dalam tahap implementasinya (Dian, 2021). Kebijakan tidak diposisikan sebagai keputusan final yang bebas nilai, tetapi sebagai produk sosial yang harus diuji rasionalitas, relevansi, dan implikasinya bagi masyarakat (Nugroho, 2021). Kerangka konseptual ini menjadi titik transisi dari deskripsi teori menuju analisis kebijakan yang lebih kritis dan reflektif, yakni menilai sejauh mana kurikulum PAI mampu menjawab tantangan pendidikan kontemporer, merepresentasikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual, serta memberi kemaslahatan bagi peserta didik dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Dengan pendekatan ini, analisis kurikulum PAI tidak berhenti pada idealitas tujuan, tetapi bergerak pada evaluasi substantif atas keberlanjutan, efektivitas, dan dampak sosialnya. Jika lebih difokuskan pada Pendidikan Islam, kebijakan pendidikan agama Islam merupakan kebijakan di bidang Pendidikan agama Islam yang menjadi suatu produk untuk dijadikan sebagai panduan dalam pengambilan Keputusan (Asy'arie, Maulidah, Nurwahyuni & Sulalah, 2024). Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam mencakup sejumlah aspek penting yang bersifat holistik dan menyeluruh dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (Warlizasusi & Sumarto, 2022).

Dalam hal ini, kebijakan tersebut menjadi landasan bagi semua tahapan, mulai dari perencanaan kurikulum hingga implementasinya di satuan pendidikan. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam bidang Pendidikan menjadi suatu yang amat penting dalam era globalisasi. Beberapa poin utama dalam konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam menurut Susanto & Widdah (2023) diantaranya: Pertama, kebijakan harus berpijak pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan moral dan etika, dengan menekankan prinsip keadilan, kebenaran, dan keutamaan akhlak.

Kedua, pelibatan aktif pemangku kepentingan termasuk masyarakat, guru, orang tua, dan peserta didik merupakan bagian penting dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketiga, kebijakan harus disusun secara inklusif dengan memperhatikan keberagaman, termasuk pemberdayaan perempuan, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Keempat, perlu ada upaya peningkatan kualitas proses pendidikan melalui metode pengajaran yang selaras dengan prinsip Islam serta menekankan aspek akademis dan moral.

Kelima, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam juga menjadi kunci, termasuk penyediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Terakhir, evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan sebagai dasar untuk menilai capaian dan mengarahkan pengembangan kebijakan secara lebih tepat dan responsif. Dalam menganalisis kebijakan Pendidikan Agama Islam dapat menggunakan model gabungan *heuristic* (Mengeksplorasi Isu), Evaluatif (Menilai Dampak), dan Kritis (Menelaah Konteks dan kekuasaan) menjadi instrumen penting yang saling melengkapi dalam proses penyusunan, implementasi, dan perbaikan kurikulum PAI.

1. Kebijakan Heuristik

Secara etimologis, kata *heuristik* berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, yang berarti menemukan atau menemukan jalan keluar. Dalam konteks kebijakan publik, *heuristik* merujuk pada suatu pendekatan pemecahan masalah yang bersifat praktis dan tidak selalu mengikuti prosedur formal ilmiah yang ketat, tetapi berdasarkan pengalaman, intuisi, dan penilaian kontekstual (Bornmann & Marewski, 2019). Model analisis *heuristik* digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi masalah kebijakan secara mendalam sebelum dilakukan analisis evaluatif atau kritis.

Model heuristik sangat berguna ketika pengambil kebijakan menghadapi situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian (Anderson, 2015). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kompleksitas tersebut muncul dalam bentuk keberagaman pemahaman keagamaan, tantangan ideologis, serta rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran agama. Pendekatan ini membantu pemangku kebijakan dalam memahami berbagai variabel dan dinamika yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, seperti kebutuhan peserta didik, konteks sosial budaya, serta tuntutan perubahan zaman (Muhaimin, 2009).

Dengan menggunakan model heuristik, proses pengembangan kurikulum dapat dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan potensi hambatan yang mungkin muncul. Melalui pendekatan heuristik, pengembangan kurikulum tidak dimulai dari teori besar, melainkan dari observasi awal terhadap realitas. Berikut beberapa Langkah yang dilakukan dalam penerapan kebijakan *heuristic*: Tahap pertama dalam model heuristik adalah perumusan isu kebijakan. Salah satu isu strategis dalam kebijakan PAI saat ini adalah ketidaksesuaian antara kurikulum yang berlaku dengan kebutuhan dan realitas kehidupan peserta didik modern.

Kurikulum PAI masih berorientasi pada aspek normatif dan kognitif, sementara peserta didik hidup di tengah arus digitalisasi dan globalisasi nilai (Manshur & Isroani, 2023). Akibatnya, pembelajaran PAI sering kali dianggap monoton dan kurang relevan dengan persoalan sosial yang dihadapi siswa, seperti etika bermedia digital, keberagaman, dan krisis moral di dunia maya (Fasya & Susilowati, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan kurikulum agar PAI mampu menghadirkan nilai-nilai Islam yang kontekstual dan aplikatif.

Tahap kedua adalah analisis opsi kebijakan. Berdasarkan hasil eksplorasi awal, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diambil diantaranya: 1) pengembangan kurikulum PAI kontekstual digital, yaitu memperbarui kurikulum dengan memasukkan tema-tema kontemporer seperti etika digital, moderasi beragama, dan tanggung jawab sosial (Rajaminsah et al., 2025). 2) peningkatan kompetensi guru PAI melalui pelatihan dan sertifikasi literasi digital, yang bertujuan agar guru memiliki kemampuan pedagogis dan teknologi untuk mengaitkan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan siswa (Huda & Setiawan, 2022). 3) integrasi media digital dalam pembelajaran PAI, melalui penggunaan aplikasi, video pembelajaran, atau platform daring yang mengandung nilai-nilai Islam moderat (Nasution, 2021). Ketiga opsi ini masing-masing memiliki potensi dan tantangan tersendiri, baik dari segi sumber daya, efektivitas implementasi, maupun keberlanjutan kebijakan. Tahap ketiga adalah prakiraan masa depan, yaitu memperkirakan dampak dari setiap opsi kebijakan yang telah dianalisis. Jika kurikulum PAI dikembangkan secara kontekstual digital, maka dalam jangka pendek siswa akan lebih memahami relevansi nilai-nilai Islam terhadap dunia modern, serta meningkatnya minat belajar terhadap PAI.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat melahirkan generasi Muslim yang religius, cakap digital, dan mampu berpikir kritis terhadap isu keagamaan global (Siregar et al., 2024). Pelatihan guru PAI juga diperkirakan akan menghasilkan pendidik yang lebih kreatif, reflektif, dan mampu mengintegrasikan nilai Islam dengan konteks sosial siswa. Sementara itu, integrasi media digital diyakini dapat memperkuat motivasi belajar dan memperluas akses pendidikan agama, meskipun tetap memerlukan kontrol terhadap validitas dan nilai konten digital (Amrullah, 2024).

Pendekatan heuristik memberikan solusi yang relevan dan adaptif dalam merumuskan kebijakan pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tengah kompleksitas tantangan zaman. Dengan berfokus pada observasi realitas, intuisi, dan konteks sosial peserta didik, pendekatan ini

memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih aplikatif dan bermakna. Penerapan model ini tidak hanya membantu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik modern, tetapi juga mendorong lahirnya generasi Muslim yang religius, literat digital, dan kritis terhadap isu-isu keagamaan serta sosial global.

2. Kebijakan Evaluatif

Evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan (Warman et al., 2023). Sedangkan menurut Akbar & Mohi (2018) evaluasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menganalisis dan menilai secara objektif isi, pelaksanaan, serta dampak suatu kebijakan atau program yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Tujuan utama evaluasi kebijakan yakni sebagai alat untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan berdampak kebijakan terhadap Masyarakat sekaligus sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan kebijakan di masa mendatang (Alfikri et al., 2025).

Evaluasi memegang peran kunci dalam analisis kebijakan, beberapa fungsi diantaranya: Pertama, evaluasi menyediakan informasi yang sah dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan, seperti sejauh mana kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah tercapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberikan kontribusi dalam mengklasifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target (Rantung, 2024). Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat memperoleh umpan balik yang objektif dan sistematis sehingga mereka dapat memperbaiki atau bahkan menghentikan kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam konteks PAI, model ini berperan penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah perubahan sosial yang cepat (Dunn, 2018). Pendekatan evaluatif tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga pada proses pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan dalam jangka Panjang. Dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan Islam, kriteria evaluasi menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan pendidikan telah berhasil sesuai harapan.

Berbeda dengan pendidikan umum yang cenderung lebih fokus pada aspek akademik dan prestasi siswa, kriteria evaluasi dalam pendidikan Islam harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana prinsip *maqashid al-ta'lim*, yaitu tujuan utama pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia sempurna (Fadillah et al., 2025). Berikut Langkah-langkah dalam penerapan kebijakan evaluatif diantaranya: Tahap pertama dalam model ini adalah evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pengaruh kebijakan PAI terhadap berbagai pemangku kepentingan, seperti peserta didik, guru, dan masyarakat. Misalnya, penerapan kurikulum PAI berbasis moderasi beragama dan literasi digital telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman keagamaan siswa yang lebih terbuka dan kontekstual. Siswa menjadi lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan bermedia digital. Di sisi lain, guru mengalami peningkatan kompetensi dalam menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Namun demikian, sebagian guru

masih menghadapi kendala dalam penyesuaian metode pengajaran dan pemanfaatan media digital secara optimal (Huda & Setiawan, 2022). Dari sisi masyarakat, kebijakan ini turut memperkuat peran sekolah sebagai agen moderasi beragama yang menanamkan nilai toleransi dan akhlak sosial di lingkungan Pendidikan. Tahap kedua adalah monitoring implementasi kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan pemantauan terhadap sejauh mana pelaksanaan kebijakan PAI sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Monitoring ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan PAI dijalankan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, baik dari aspek program, metode pembelajaran, peran pendidik, maupun dukungan sarana dan regulasi.

Melalui tahap ini dapat diidentifikasi tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan, hambatan yang muncul selama implementasi, serta kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas praktik (Nasution, 2021). Dengan demikian, monitoring berfungsi sebagai dasar awal untuk melakukan perbaikan, penyesuaian, atau pengambilan keputusan lanjutan agar kebijakan PAI berjalan efektif dan sesuai dengan arah yang diharapkan. Tahap ketiga adalah analisis kelanjutan kebijakan dengan pengambilan keputusan strategis yang dilakukan setelah diperoleh data dan temuan dari tahap monitoring dan evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, seluruh informasi terkait efektivitas, efisiensi, relevansi, serta dampak kebijakan PAI dianalisis secara komprehensif untuk menilai keberlanjutan kebijakan tersebut.

Analisis ini bertujuan menentukan apakah kebijakan PAI masih layak untuk dilanjutkan karena mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, perlu direvisi karena terdapat kelemahan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan aktual, atau justru dihentikan apabila kebijakan dinilai tidak efektif, menimbulkan dampak negatif, atau tidak lagi relevan dengan konteks sosial dan Pendidikan (Aziza, 2024). Tahap ini menjadi titik krusial dalam siklus kebijakan karena memastikan bahwa kebijakan PAI yang dijalankan tetap adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. (Purwanto, 2023).

3. Kritis Kebijakan

Kebijakan kritis merupakan pendekatan dalam analisis dan pembuatan kebijakan yang menekankan pada kesadaran terhadap hubungan kekuasaan, ketidakadilan, dan dominasi dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang bersifat teknokratis dan netral, kebijakan kritis melihat kebijakan publik sebagai arena di mana kepentingan kelompok tertentu dapat mendominasi dan menindas kelompok lain (Fischer, 2003). Pendekatan ini menuntut agar pembuat kebijakan tidak hanya fokus pada efisiensi atau efektivitas semata, tetapi juga pada aspek keadilan sosial, inklusivitas, dan transformasi struktural.

Menurut Ball (1997) analisis kebijakan kritis bertujuan untuk mengungkap bagaimana kebijakan dapat mereproduksi ketidaksetaraan dan bagaimana ia dapat direformasi agar lebih adil dan memberdayakan. Kebijakan tersebut dirancang untuk: Mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan, memberdayakan kelompok yang terpinggirkan, mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan, serta menegakkan nilai-nilai etika dan moral dalam kebijakan *public*. Dengan kata lain, kebijakan kritis mendorong pemeriksaan mendalam terhadap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh suatu kebijakan. Model analisis kritis merupakan pendekatan yang berupaya memahami kebijakan pendidikan tidak hanya sebagai dokumen normatif, tetapi sebagai produk dari dinamika sosial, politik, dan kekuasaan yang kompleks. Pendekatan ini menyoroati bagaimana kebijakan dapat mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, serta bagaimana konstruksi sosial dan sejarah memengaruhi arah kebijakan tersebut (Ball, 1997). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), analisis kritis digunakan untuk

mengungkap bagaimana kebijakan pendidikan agama dibentuk oleh ideologi, relasi kekuasaan, dan kepentingan politik yang sering kali tersembunyi di balik bahasa moral dan religius yang digunakan dalam kebijakan. Berikut langkah-langkah dalam penerapan kebijakan kritis diantaranya:

Tahap pertama dalam model ini adalah pendekatan interpretasi, yaitu memahami kebijakan PAI melalui makna sosial dan konteks historis yang melatarbelakanginya. Secara historis, kebijakan PAI di Indonesia lahir dari pergulatan panjang antara semangat nasionalisme dan keagamaan sejak masa awal kemerdekaan. Pendidikan agama dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai bentuk kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam (Aza, 2019). Dalam konteks kontemporer, kebijakan PAI terus mengalami transformasi seiring perubahan sosial dan politik. Di era reformasi dan digital, misalnya, kebijakan PAI diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama dan menangkal ekstremisme, namun di sisi lain juga dihadapkan pada tuntutan globalisasi, pluralitas budaya, dan kebebasan berpikir (Iswar et al., 2025).

Melalui pendekatan interpretatif ini, kebijakan PAI dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan nilai religius, nasional, dan modern. Tahap kedua adalah analisis kekuasaan, yang menelaah siapa aktor-aktor dominan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan PAI, serta bagaimana kekuasaan mereka memengaruhi arah kebijakan. Dalam praktiknya, kebijakan PAI di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh lembaga-lembaga keagamaan besar dan birokrasi pendidikan yang berorientasi pada ideologi mayoritas (Manshur & Isroani, 2023). Hal ini membuat narasi dan pendekatan dalam kebijakan PAI sering kali merepresentasikan pemahaman keagamaan tertentu, sementara perspektif minoritas atau pendekatan alternatif terhadap Islam kurang mendapatkan ruang. Selain itu, relasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan juga memperlihatkan dinamika kekuasaan dalam pengelolaan kebijakan pendidikan agama. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat identitas keagamaan nasional; di sisi lain, ia juga berpotensi digunakan sebagai alat legitimasi politik atau moral oleh pihak-pihak tertentu (Subarsono, 2023). Dengan demikian, kebijakan PAI bukanlah produk netral, melainkan hasil negosiasi antaraktor yang memiliki pengaruh sosial dan politik berbeda-beda.

Tahap ketiga adalah mengungkap bias dalam kebijakan PAI. Analisis kritis berupaya mengidentifikasi bias yang mungkin terkandung dalam isi maupun implementasi kebijakan. Misalnya, beberapa kebijakan PAI masih menonjolkan pendekatan normatif yang kurang memperhatikan konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia (Fathurrohman, 2022). Bias ini tampak pada materi ajar yang berorientasi pada mazhab atau pandangan tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan semangat pluralisme Islam yang inklusif.

Selain itu, terdapat kecenderungan bias gender dalam beberapa praktik pembelajaran yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pendidikan agama (Tanjung, 2025). Analisis kritis juga menunjukkan bahwa kebijakan PAI kadang masih terjebak pada narasi formalitas religius, tanpa secara mendalam mendorong pembentukan kesadaran sosial, etika publik, dan keadilan sosial sebagaimana semangat Islam substantif. Kebijakan PAI di Indonesia saat ini lebih dominan bersifat moderatif, meskipun masih menyisakan kecenderungan hegemonik dan belum sepenuhnya mencapai karakter transformatif.

Orientasi moderatif terlihat dari upaya negara menjadikan PAI sebagai instrumen penyeimbang antara nilai keislaman, nasionalisme, dan tuntutan modernitas, khususnya melalui pengarusutamaan moderasi beragama, penguatan toleransi, dan pencegahan ekstremisme. Namun, pada saat yang sama, dominasi aktor mayoritas keagamaan dan birokrasi pendidikan dalam proses perumusan kebijakan menunjukkan adanya praktik

hegemonik yang halus, di mana tafsir keagamaan tertentu dilembagakan sebagai arus utama, sementara perspektif minoritas, pendekatan pluralis, dan wacana Islam kritis belum memperoleh ruang yang setara. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan PAI masih berfungsi lebih sebagai alat stabilisasi sosial dan ideologis daripada sebagai sarana perubahan struktural.

Pengembangan kurikulum PAI memerlukan pergeseran dari pendekatan moderatif yang bersifat normatif menuju orientasi yang lebih transformatif dan emansipatoris. Kurikulum PAI tidak cukup hanya menekankan sikap toleran dan moderasi secara konseptual, tetapi perlu secara sadar mendorong pembentukan kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial, ketidakadilan, relasi kuasa, serta isu-isu kemanusiaan dalam bingkai nilai-nilai Islam substantif. Dengan demikian, kurikulum PAI dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang membebaskan, memberdayakan, dan relevan dengan dinamika masyarakat majemuk, sekaligus menggeser peran PAI dari sekadar penjaga harmoni sosial menuju agen transformasi sosial yang berkeadilan dan inklusif. Setiap model memiliki peran, karakteristik, serta kontribusi yang berbeda dalam proses perumusan, implementasi, dan penilaian kebijakan pendidikan. Di satu sisi, model-model tersebut menawarkan berbagai kekuatan yang dapat memperkaya analisis kebijakan secara lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis realitas lapangan. Namun di sisi lain, masing-masing juga memiliki keterbatasan yang perlu dipahami agar penggunaannya tidak menimbulkan bias, ketidaktepatan analisis, maupun hambatan implementatif. Tabel berikut menyajikan perbandingan ketiga model secara ringkas dan sistematis.

Tabel 1. Perbandingan Model Kebijakan Heuristik, Evaluatif, dan Kritis

Perbandingan	Model Heuristik	Model Evaluatif	Model Kritis
Kelebihan	Adaptif dan fleksibel.	Memberikan ukuran objektif keberhasilan kebijakan.	Mengungkap ketidakadilan, bias, dan dominasi.
	Relevan berdasarkan realitas lapangan.	Memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan.	Berorientasi pada keadilan sosial.
	Responsif terhadap isu kontemporer seperti digitalisasi.	Memperkuat akuntabilitas.	Membaca kebijakan secara mendalam dan reflektif.
	Mendorong kreativitas dan inovasi kebijakan.	Berbasis data dan bukti empiris.	Menawarkan dasar perubahan struktural.
Kekurangan	Tidak sepenuhnya sistematis.	Bergantung pada ketersediaan data valid.	Cenderung teoritis.
	Berpotensi bias subjektif.	Fokus pada aspek terukur sehingga nilai spiritual kurang terlihat.	Sensitif karena menyinggung kekuasaan.
	Bergantung pada intuisi pengambil kebijakan.	Memakan waktu dan biaya.	Memerlukan pengetahuan analitis tinggi.
	Kurang rinci dalam aspek teknis.	Terkadang hasilnya tidak ditindaklanjuti.	Sulit diterapkan pada kebijakan teknis jangka pendek.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa model heuristik, evaluatif, dan kritis memiliki karakteristik epistemologis dan fungsional yang berbeda dalam analisis kebijakan. Ketiganya saling melengkapi dalam menjawab tantangan kurikulum PAI yang kompleks di era modern. Model heuristik berperan dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dan merumuskan solusi berdasarkan realitas sosial yang ada. Pendekatan evaluatif memastikan bahwa kebijakan yang diambil berjalan efektif, efisien, dan relevan melalui pengukuran dampak dan keberlanjutan pelaksanaan. Sementara itu, pendekatan kritis membuka ruang refleksi terhadap relasi kekuasaan, bias ideologis, dan ketidakadilan yang mungkin tersembunyi dalam kebijakan. Integrasi ketiga model ini mendorong lahirnya kebijakan PAI yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman yang inklusif, adil, dan kontekstual.

Kesimpulan

Analisis kebijakan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan zaman. Pendekatan gabungan heuristik, evaluatif, dan kritis memberikan kerangka kerja yang menyeluruh dalam memahami, menilai, dan memperbaiki kebijakan pendidikan. Model heuristik membantu dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dan kebutuhan kontekstual peserta didik, evaluatif berfungsi untuk mengukur dampak dan efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan pendekatan kritis mengungkap bias kekuasaan serta memastikan keadilan sosial dan inklusivitas dalam proses kebijakan. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga model analisis tersebut mampu menghasilkan kebijakan PAI yang lebih adaptif, responsif, dan transformatif. Kebijakan yang ideal tidak hanya berfokus pada aspek kognitif keagamaan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, teknologi, dan keberagaman budaya. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian kebijakan PAI dengan menawarkan model analisis integratif yang melampaui pendekatan normatif-deskriptif, sehingga memungkinkan pembacaan kebijakan secara kontekstual, reflektif, dan transformatif. Temuan ini diharapkan mampu memberikan rujukan bagi perumus kebijakan dan pengembang kurikulum PAI dalam mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan, menilai efektivitas implementasi kebijakan, serta meminimalkan bias ideologis agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap tantangan sosial, teknologi, dan keberagaman budaya. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis pada studi kepustakaan, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika empiris implementasi kebijakan PAI di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi lapangan atau mixed methods diperlukan untuk menguji secara empiris efektivitas model gabungan ini dalam konteks kebijakan dan pengembangan kurikulum PAI di berbagai satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Akar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Newbury Park: Ideas Publishing.
- Alfikri, M. Y., Arnisyi, U., Azizah, Y. N., Noerikhsan, S., Mawaddah, N., & Hakim, A. T. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori Dan Karakteristik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 29-33.
- Amrullah, A. (2024). Transformasi Digital Dalam Pendidikan Agama Islam: Kajian Implementasi Metaverse Sebagai Media Pembelajaran Interaktif. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 57-66.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning.

- Asmawi, M. N. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 1(2), 101-109.
- Asy'arie, B. F., Maulidah, N. I., Nurwahyuni, E., & Sulalah, S. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah: Dampaknya terhadap Pemahaman Agama, Nilai Moral, Psikologi dan Sosial. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 264-277.
- Aza, A. (2019). *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Aziza, I. F. (2024). Reformulasi Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Era Disrupsi Digital. *JlPI (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 3(2), 65-75.
- Ball, S. J. (1997). Policy Sociology And Critical Social Research: A Personal Review Of Recent Education Policy And Policy Research. *British Educational Research Journal*, 23(3), 257-274.
- Bornmann, L., & Marewski, J. N. (2019). Heuristics As Conceptual Lens For Understanding And Studying The Usage Of Bibliometrics In Research Evaluation. *Scientometrics*, 120(2), 419-459.
- Dian. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Fadillah, R., Sapriha, E., Paturahman, S. H., Febriadi, R. A., & Renata, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam: Konsep, Model, Kriteria, Dan Tantangan Implementasi Di Lembaga Pendidikan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1717-1734.
- Fasya, Z., & Susilowati, A. (2022). Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar Islam Era Disrupsi. *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 18(02), 4-24.
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasanah, L., & Ma'ruf, H. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Dengan Model CIPP di Madrasah. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 9(2), 45-59.
- Huda, M., & Setiawan, R. (2022). Penguatan Kompetensi Digital Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 55-70.
- Iswar, N. S., Maimun, M., Winengan, W., & Lubna, L. (2025). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Penguatan Moderasi Beragama di Era Digital pada Sekolah Menengah Atas di Lombok Timur. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(5), 6930-6939.
- Jannah, I., Chayati, S., & Khuriyah, K. (2024). Pendekatan Literatur Dalam Analisis Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Merdeka: Perspektif Kebijakan Dan Implementasi. *Jurnal Media Akademik*, 2(11).
- Manshur, A., & Isroani, F. (2023). Tantangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4), 351-368.
- Muhaimin, M. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Z. (2021). Integrasi Media Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *EduTech: Journal of Educational Technology*, 8(1), 77-89.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo.
- Nurhadi, A. (2022). Partisipasi Guru dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 97-110.

- Purwanto, A. (2023). Digitalisasi Era 4.0 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(5), 1155-1166.
- Rajaminsah, R., Yudiyanto, M., Firdausi, M. I., Musoddiq, M., & Anisa, R. (2025). Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth. *Alacrity: Journal Of Education*, 5(2), 1052-1065.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Tondano: Tahta Media Group.
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan Studi Kritis dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 44-60.
- Siregar, N. S., Siregar, P. S., & Gusmaneli, G. (2024). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0: Strategi Menghadapi Tantangan Teknologi Digital dan Inovasi. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(1).
- Subarsono, S. (2023). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, D., & Widdah, M. E. (2023). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 96-104.
- Tanjung, A. (2025). Pendidikan dan Gender : Studi Tentang Bias Gender dalam Buku Pelajaran Agama Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(4).
- Tilar, H. A., & Nugroho, R. (2019). *Kebijakan Pendidikan: Perspektif Analisis Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Warlizasusi, J., & Sumarto, S. (2022). *Analisi Kebijakan Pendidikan Islam*. Tasikmalaya: Penerbit Buku Literasiologi.
- Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25-32.